

DANA BANTUAN GIZI YANG TIDAK TEPAT SASARAN

Anggi Br Sianipar

anggisianipar6025@gmail.com

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan RI

1. PENDAHULUAN

Gizi tetap menjadi salah satu tantangan utama dalam kesehatan masyarakat di Indonesia. Berbagai program pemerintah telah diluncurkan untuk mengatasi masalah ini, salah satunya melalui penyaluran dana bantuan gizi kepada kelompok yang membutuhkan, seperti balita, ibu hamil, dan keluarga yang berisiko mengalami stunting (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat dan mengurangi angka malnutrisi (World Health Organization, 2021).

Namun, dalam pelaksanaannya, berbagai masalah telah ditemui, salah satunya adalah penyaluran dana bantuan gizi yang tidak tepat sasaran. Hal ini terjadi ketika bantuan yang seharusnya diterima oleh kelompok yang benar-benar membutuhkan justru diterima oleh pihak lain yang tidak memenuhi kriteria penerima bantuan. Hal ini dapat disebabkan oleh kesalahan dalam pengumpulan data, kurangnya pengawasan, atau faktor administratif pada tingkat pelaksanaan (World Bank, 2020).

Masalah ini penting untuk dibahas karena ketidakakuratan sasaran dalam program bantuan gizi dapat menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Jika dana bantuan tidak diterima oleh kelompok yang membutuhkan, maka tujuan program untuk mencegah masalah gizi seperti stunting, wasting, dan berat badan kurang tidak dapat tercapai secara optimal (World Health Organization, 2021).

2. PERNYATAAN OPINI

Dana bantuan gizi yang salah alokasi merupakan masalah serius dalam implementasi program kesehatan masyarakat karena dapat mengurangi efektivitas intervensi gizi yang dirancang oleh pemerintah (Soekirman, 2018). Program bantuan gizi pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan status gizi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah guna mencegah berbagai masalah gizi seperti stunting, wasting, dan anemia (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi kasus bantuan yang salah sasaran akibat kesalahan pengumpulan data, ketidakakuratan data penerima, dan pengawasan yang lemah dalam proses distribusi bantuan (World Bank, 2020). Situasi ini menyebabkan bantuan yang seharusnya diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan justru diterima oleh pihak yang tidak memenuhi kriteria penerima bantuan. Akibatnya, tujuan utama program untuk meningkatkan status gizi masyarakat tidak tercapai secara optimal (World Health Organization, 2021), dan kesenjangan akses terhadap bantuan sosial dapat semakin melebar.

3. ARGUMEN ILMIAH

Ketidakakuratan dalam penargetan distribusi bantuan gizi seringkali disebabkan oleh sistem pengumpulan data yang tidak akurat untuk penerima bantuan. Dalam konteks masyarakat yang rentan, perubahan kondisi ekonomi dapat terjadi dengan cepat, misalnya akibat kehilangan pekerjaan, perubahan harga pangan, atau kondisi kesehatan keluarga,

sehingga data yang tidak diperbarui secara berkala menjadi tidak relevan dengan kondisi aktual di lapangan.

Data tentang penerima bantuan umumnya diperoleh dari pengumpulan data rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tenaga kesehatan, atau melalui Sistem Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS). Namun, dalam beberapa kasus, data ini tidak diperbarui secara teratur, sehingga tidak mencerminkan kondisi sosial ekonomi dan status gizi masyarakat yang sebenarnya (World Bank, 2020; Kementerian Kesehatan RI, 2022). Selain itu, proses verifikasi data di lapangan juga seringkali menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antarpetugas, serta minimnya pemanfaatan teknologi dalam sistem pendataan. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesalahan inklusi (inclusion error) dan eksklusi (exclusion error) yang berdampak langsung pada efektivitas program bantuan gizi.

3.1. Argumen Pertama: Kurangnya Koordinasi Antarinstansi sebagai Penyebab Ketidaktepatan Sasaran Dana Bantuan Gizi

Kurangnya koordinasi antarinstansi juga menjadi faktor yang menyebabkan dana bantuan gizi tidak tepat sasaran. Dalam pelaksanaan program bantuan gizi, terdapat berbagai pihak yang terlibat, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, serta aparat desa atau kelurahan. Apabila koordinasi antar pihak tersebut tidak berjalan dengan baik, maka proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan menjadi kurang optimal.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas, 2019), koordinasi lintas sektor merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan program intervensi gizi di Indonesia. Tanpa koordinasi yang baik, proses distribusi bantuan dapat mengalami hambatan sehingga bantuan tidak sampai kepada kelompok yang paling membutuhkan.

3.2. Argumen Kedua: Lemahnya Sistem Pengawasan dan Evaluasi dalam Penyaluran Dana Bantuan Gizi

Lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi juga menjadi penyebab utama ketidaktepatan sasaran bantuan gizi. Pengawasan yang tidak optimal dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penyaluran bantuan.

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen penting dalam program intervensi gizi untuk memastikan bahwa bantuan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat. Faktor lain yang menyebabkan dana bantuan gizi tidak tepat sasaran adalah lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi dalam proses distribusi bantuan. Pengawasan yang tidak optimal dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penyaluran bantuan, baik karena kesalahan administratif maupun karena kurangnya transparansi dalam pelaksanaan program. Tanpa adanya sistem pengawasan yang kuat, sangat sulit untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diterima oleh kelompok yang menjadi sasaran program.

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen penting dalam program intervensi gizi untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat. Evaluasi yang dilakukan secara berkala dapat membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program serta menemukan solusi yang tepat untuk memperbaiki sistem distribusi bantuan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi perlu dilakukan agar distribusi dana bantuan gizi dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

3.3. Argumen Ketiga: Rendahnya Literasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Program Bantuan Gizi

Faktor lain yang menyebabkan dana bantuan gizi tidak tepat sasaran adalah rendahnya literasi dan partisipasi masyarakat dalam program bantuan gizi. Banyak masyarakat yang belum memahami tujuan, mekanisme, serta kriteria penerima bantuan, sehingga terjadi kesalahpahaman dalam proses pendataan maupun penerimaan bantuan. Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga membuat potensi kesalahan dalam penyaluran bantuan menjadi lebih sulit terdeteksi.

Menurut Soekirman (2018), keterlibatan aktif masyarakat merupakan faktor penting dalam keberhasilan program gizi. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik akan lebih mampu memastikan bahwa bantuan diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan agar distribusi dana bantuan gizi dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Monitoring dan evaluasi merupakan komponen penting dalam program intervensi gizi untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan dapat memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat. Evaluasi yang dilakukan secara berkala dapat membantu pemerintah mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program serta menemukan solusi yang tepat untuk memperbaiki sistem distribusi bantuan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi perlu dilakukan agar distribusi dana bantuan gizi dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

4. DISKUSI / IMPLIKASI

Ketidaktepatan sasaran dalam distribusi dana bantuan gizi memiliki berbagai implikasi bagi masyarakat dan kebijakan kesehatan. Dari sisi masyarakat, kondisi ini dapat memperburuk kesenjangan akses terhadap bantuan sosial. Kelompok yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak memperoleh manfaat dari program pemerintah, sementara kelompok yang tidak terlalu membutuhkan masih menerima bantuan tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan sosial serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.

Dari sisi kebijakan, masalah ini menunjukkan bahwa sistem pendataan, verifikasi, dan pengawasan dalam program bantuan gizi masih perlu diperbaiki. Pemerintah perlu melakukan pemutakhiran data penerima bantuan secara berkala agar data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat yang sebenarnya. Selain itu, keterlibatan tenaga kesehatan dan tenaga gizi dalam proses verifikasi data juga sangat penting, karena mereka memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kondisi status gizi masyarakat di lapangan.

Dengan adanya perbaikan dalam sistem pendataan dan pengawasan, diharapkan program bantuan gizi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Hal ini juga dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan kesehatan, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi angka masalah gizi di Indonesia. Ketidaktepatan sasaran dalam distribusi dana bantuan gizi memiliki implikasi terhadap kesenjangan akses bantuan sosial (World Bank, 2020). Dari sisi kebijakan, hal ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem pendataan dan pengawasan (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

5. PENUTUP

Dana bantuan gizi merupakan salah satu upaya penting yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan status gizi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan bantuan tersebut tidak selalu tepat sasaran. Ketidakkuratan data penerima bantuan, kurangnya koordinasi antarinstansi, serta lemahnya sistem pengawasan menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam distribusi bantuan.

Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya perbaikan untuk memastikan bahwa dana bantuan gizi dapat didistribusikan secara tepat sasaran. Pemerintah perlu meningkatkan kualitas sistem pengumpulan dan pembaruan data penerima bantuan, memperkuat koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan program, serta meningkatkan mekanisme pengawasan dan evaluasi secara berkala. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program bantuan gizi dapat memberikan dampak yang lebih nyata dalam meningkatkan status gizi masyarakat serta mendukung tercapainya pembangunan kesehatan yang berkelanjutan di Indonesia.

REFERENSI

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2019). *Pedoman pelaksanaan intervensi penurunan stunting terintegrasi*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). *Profil kesehatan Indonesia tahun 2021*. Kementerian Kesehatan RI.
- Soekirman. (2018). *Ilmu gizi dan aplikasinya untuk keluarga dan masyarakat*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- UNICEF. (2021). *Improving child nutrition: The achievable imperative for global progress*. United Nations Children's Fund.
- World Bank. (2020). *Indonesia social assistance public expenditure review*. World Bank.
- World Health Organization. (2021). *Malnutrition*. World Health Organization.
<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malnutrition>